BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang kerja praktek

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. (Abdullah, 2014). Penyaluran tersebut berbentuk kredit unutk modal usaha, konsumsi dan investasi. Lembaga keungan dapat berperan serta secara aktif kepada masyarakat dalam mendistribusikan dananya untuk kredit usaha. (Wiwoho,2014). Lembaga keuangan secara umum dibagi kedalam dua jenis yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank (LKNB). Pada praktiknya, lembaga keuangan bank menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sementara itu koperasi menghimpun dana saja dari anggota dan menyalurkannya kepada anggotanya kembali. (Sari, 2019)

Lembaga keuangan non bank yang salah satunya koperasi merupakan salah satu lembaga yang berfokus membiayai kegiatan bisnis usaha micro, kecil dan menengah (UMKM), hal ini disebabkan koperasi mampu menyesuikan ritme dan karakter yang melekat UMKM . Berdasarkan hal ini dapat diartikan bahwa bahwa koperasi menjadi lembaga keuangan yang cukup mempunyai pengaruh dalam UMKM (Sarwoko, 2009). Di Bandar lampung, koperasi merupakan sebuah

lembaga keuangan yang sudah banyak dikenal dimasyarakat dan banyak mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah data yang dipaparkan oleh Dinas koperasi dan UMKM provinsi Lampung.

Tabel 1.1 Perkembangan Koperasi Provinsi Lampung.

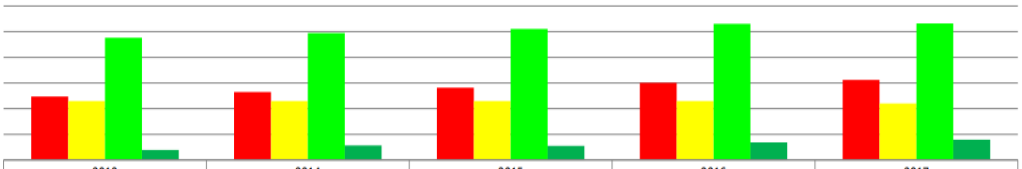

	2013	2014	2015	2016	2017
Aktif	2,469	2,647	2,813	3,008	3,121
Tdk Aktif	2,294	2,297	2,297	2,297	2,204
JUMLAH	4,763	4,944	5,110	5,305	5,325
RAT	386	565	552	688	791

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung

Jumlah Koperasi per 31 Desember 2017 sebanyak 5.325 unit Koperasi. Secara kelembagaan mengalami peningkatan sebanyak 20 unit Koperasi dari jumlah koperasi per desember 2016 sebanyak 5.305 unit. Berdasarkan hal tersebut total koperasi yang ada sejumlah 5.320 unit Koperasi, terdiri dari 3.121 (58,61%) Koperasi yang aktif dan 2.204 (41,39%) Koperasi yang tidak aktif. Adapun jumlah anggota koperasi sampai dengan saat ini sebesar 887.537 orang anggota dengan penyerapan tenaga kerja sejumlah 5.520 orang tenaga kerja (karyawan+manager). Jumlah UMKM per 31 Desember 2017 sebanyak 99.307 unit. Secara kuantitas mengalami peningkatan sebesar 4.149 unit.

Berdasarkan hal tersebut koperasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi semua kalangan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Perkembangan koperasi saat ini didukung oleh perkembangan UMKM di

Lampung khususnya di kota Bandar Lampung. Seiring dengan meningkatnya perekonomian masyarakat di Bandar Lampung ,koperasi diharapkan dapat membantu didalam penyediaan dana untuk membiayai dan mengembangkan usaha industri, pertanian, perdagangan maupun sektor non keuangan lainnya. (Juniantara *et al.*, 2015). Dapat dilihat pada gamabr 1.1 perkembangan UMKM di provinsi Lampung tahun 2017:

Gambar 1.1

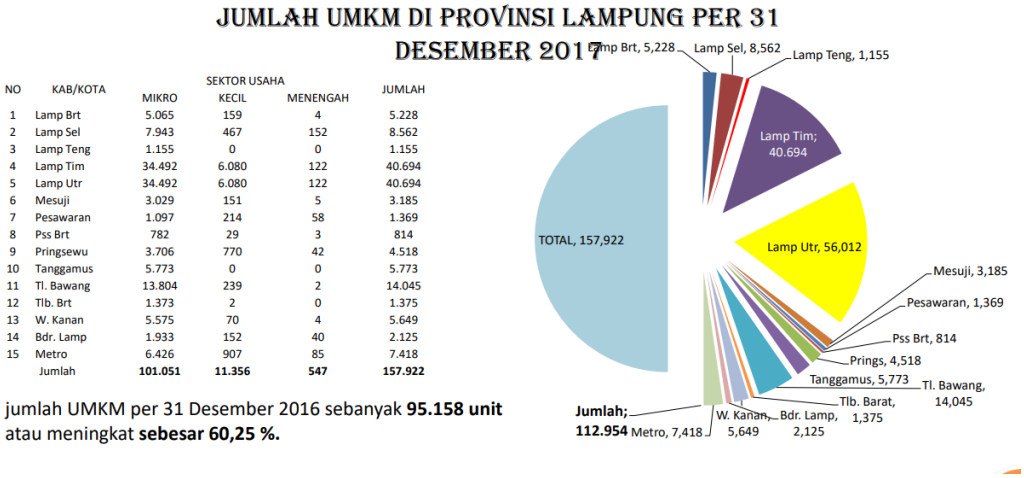

NO	KAB/KOTA	SEKTOR USAHA MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH
1	Lamp Brt	5.065	159	4	5.228
2	Lamp Sel	7.943	467	152	8.562
3	Lamp Teng	1.155	0	0	1.155
4	Lamp Tim	34.492	6.080	122	40.694
5	Lamp Utr	34.492	6.080	122	40.694
6	Mesuji	3.029	151	5	3.185
7	Pesawaran	1.097	214	58	1.369
8	Pss Brt	782	29	3	814
9	Pringsewu	3.706	770	42	4.518
10	Tanggamus	5.773	0	0	5.773
11	Tl. Bawang	13.804	239	2	14.045
12	Tlb. Brt	1.373	2	0	1.375
13	W. Kanan	5.575	70	4	5.649
14	Bdr. Lamp	1.933	152	40	2.125
15	Metro	6.426	907	85	7.418
	Jumlah	**101.051**	**11.356**	**547**	**157.922**

Sumber : Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, 2017

Jumlah UMKM per 31 Desember 2016 sebanyak 95.158 unit atau meningkat sebesar 60,25% pada tahun 2017. Hal ini membuktikan perkembangan UMKM di provinsi Lampung sangat besar. Usaha micro, kecil dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang segnifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UMKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang

segnifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UMKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari koperasi atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh koperasi tidak dapat dipenuhi. (Jauhari, 2014).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Secara keseluruhan memiliki andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarkat. Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuannya usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping ini juga terdapat persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas. (Sari, 2019)

Perkembangan lembaga pembiayaan UMKM terjadi seiring dengan perkembangan UMKM serta masih banyaknya hambatan UMKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal.

Selain itu berkembangnya lembaga pembiayaan ini juga tidak terlepas dari karakterisitiknya yang memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan. Hampir seluruh UMKM mengeluhkan sulitnya mendapatkan pembiayaan dari perbankaan karena ada ketentuan jaminan. permodalan UMKM hingga kini lebih banyak menggantungkan pada pemupukan modal sendiri *(self financing)* yang sangat terbatas. Sebagian besar UMKM yang didefinisikan *unbankable group* merupakan usaha yang sulit tersentuh oleh perbankan. Hal ini membutuhkan peran koperasi sebagai penghubung dan mitra dalam membangun hubungan dengan perkoperasian. (Panjaitan,2019).

Salah satu usaha dari lembaga keuangan adalah memberikan fasilitas kredit kepada nasabah. Kredit modal usaha merupakan salah satu dari jenis-jenis kredit yang diberikan oleh pihak kreditur kepada nasabah untuk membiayai operasionalisasi perusahaan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kredit modal usaha adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan. Prinsip dari modal usaha ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha, yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit koperasi kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku, kemudian diproses menjadi barang jadi lalu dijual baik secara tunai ataupun kredit, dan selanjutnya memperoleh uang tunai kembali. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasinya tersebut. (Inayah *et al.*, 2014).

Telah banyak lembaga keuangan bank atau non bank yang menawarkan kredit untuk modal usaha bagi para pelaku usaha, dengan tingkat suku bunga bersaing dan prosedur yang mudah. Ritonga dan Firdaus (2003) menyatakan bahwa kredit modal untuk usaha atau kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha. Kredit modal usaha ini khusus diberikan kepada pelaku usaha, yang akan mengembangkan usahanya atau meningkatkan produktivitas usaha.

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur kredit, Koperasi Bina Mandiri Sejahtera (KBMS) sebagai lembaga keuangan non bank tentunya mempunyai resiko. Resiko tersebut umumnya berupa kredit bermasalah. Kredit bermasalah tidak dapat dihindari bagi setiap lembaga keuangan. (Bintari, et all. 2013).

Risiko dan lembaga keuangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada lembaga keuangan. Hal ini dapat dipahami karena setiap usaha maupun kegiatan yang dilakukan dapat dipastikan akan memiliki suatu risiko, baik risiko yang dapat ditangani maupun risiko yang sulit ditangani. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian risiko agar kegiatan koperasi tetap berjalan seperti yang diharapkan, pengendalian risiko tersebut dapat dilakukan melalui sebuah proses manajemen risiko. (Hasibuan *et al.*, 2019)

Mengingat dampak yang timbulkan kredit macet sangat berpengaruh pada performa koperasi, maka kredit macet / bermasalah tersebut harus segera diatasi. Untuk itu koperasi seharusnya dapat mengelola manajemen risiko dengan baik. Manajemen risiko merupakan suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. (Hasibuan *et al.*, 2019)

Dalam pelaksanaan kerja praktek, mahasiswa dituntut melakukan pengamatan terhadap suatu kegiatan di lapangan, sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengetahui kegiatan di lapangan secara langsung dan mampu mengaitkannya dengan teori dan praktek yang di dapat dibangku kuliah. Pentingnya Kerja Praktek ini adalah agar mahasiswa dapat membantu memecahkan permasalahan yang ada di lapangan dengan memberikan solusi yang tepat sehingga program kerja yang di buat bermanfaat bagi perusahaan.

Selama mengikuti kerja praktek, di samping melakukan pengamatan langsung juga sedapat mungkin ikut aktif di lapangan, sehingga diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan skill dan kemampuan serta profesionalisme kinerja. Dengan demikian akan menumbuhkan sikap mandiri dan kritis dalam diri manusia tersebut serta diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan kreatifitasnya di lapangan. Selain itu, diharapkan program kerja yang di buat oleh masing – masing mahasiswa dapat terus digunakan oleh

perusahaan meskipun periode KP telah berakhir, dengan demikian program kerja mahasiswa memang benar di butuhkan dan bermanfat bagi perusahaan.

Dalam penyusunan program kerja yang sesuai dengan bidang akademik masing – masing mahasiswa, penulis memiliki beberapa program kerja yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi Bina Mandiri Sejahtera (KBMS), program kerja ini akan sangat bermanfaat bagi perusahaan tersebut karena program kerja ini mengaplikasikan bagaimana implementasi manajemen resiko kredit dalam meningkatkan kualitas kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah.

Berdasarkan uraian di atas, dalam pelaksanaan kerja praktek di Koperasi Bina Mandiri Sejahtera (KBMS) penulis menemukan permasalahan terkait dengan resiko kredit UMKM yang akan mengakibatkan kredit bermasalah pada proses penyalurannya. Salah satu faktor dari resiko kredit tersebut adalah pengoptimalisasian kualitas kredit yang dimiliki KBMS. Hal ini diperlukan manajemen resiko kredit yang baik untuk mengatasi kredit bermasalah yang akan timbul. Penulis akan mengimplementasikan manajemen resiko kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah melalui beberapa program kerja. Laporan ini ditulis untuk memberikan gambaran bagaimana penulis menerapkan manajemen resiko kredit di KBMS dalam upaya meningkatkan kualitas kredit dalam rangka mengatasi kredit bermasalah sehingga kredit bermasalah dapat diminimalisir.

1.2 Ruang Lingkup Kerja Program Kerja Praktek

Ruang lingkup laporan program kerja selama kerja praktek adalah manajemen resiko kredit yang diterapkan di KBMS. Manajemen risiko kredit merupakan

kebijakan dan strategi lembaga keuangan yang mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko kredit yang mungkin terjadi pada tingkat keuntungan yang diharapkan. Pelaksanaan manajemen risiko kredit sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya risiko tunggakan kredit yang semakin meningkat. Pihak KBMS perlu secara aktif dalam melakukan peninjauan nasabah yang kemungkinan akan mengalami penunggakan kredit sehingga pihak koperasi dapat mengantisipasi sejak awal.

Penulis disini ditempatkan pada posisi *Credit officer* yang mempunyai tugas memproses berkas pengajuan kredit dengan melakukan *survey* dan wawancara langsung di tempat usaha calon nasabah untuk menilai kelayakan jenis usaha dalam memenuhi kriteria peminjam. Dalam prosedurnya, kebijakan dan penetapan limit serta proses pengidentifikasi kelayakan usaha merupakan bagian dari manajemen resiko kredit KBMS.

1.3 Manfaat dan Tujuan Program Kerja Praktek

1.3.1 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

Bagi Koperasi Bina Mandiri Sejahtera (KBMS)

- Membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di perusahaan tempat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan
- Sebagai sarana kerjasama antara perusahaan dengan fakultas Ekonomi perguruan tinggi IIB Darmajaya di masa yang akan datang.

- Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada Koperasi Bina Mandiri Sejahtera dan dalam menentukan strategi penyaluran kredit dan peningkatan kualitas kredit..
- Membantu Koperasi Bina Mandiri Sejahtera (KBMS) dalam menetapkan kebijakan prosedur pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah.
- Meningkatkan kualitas kredit KBMS untuk meredusisasi timbulnya masalah kredit.

Bagi Kampus IIB Darmajaya

- Sebagai bahan evaluasi kurikulum yang telah diterapkan, serta menemukan penyesuaiannya dengan kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dalam bidangnya.
- Sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi proposal selanjutnya.
- Menambah referensi perpustakaan IBI Darmajaya khususnya program studi manajemen.

Bagi Mahasiswa

- Dapat mengetahui lebih jauh realita ilmu yang telah diterima diperkuliahan dengan kenyataan dilapangan.
- Memperdalam dan meningkatkan keterampilan dan kreativitas diri dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.
- Dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan kerjanya dimasa yang akan datang.

- Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman.
- Para mahasiswa umumnya lebih puas ketimbang dengan pembelajaran yang sifatnya teoritis.
- Dapat meningkatan keterampilan dan sikap kerja para mahasiswa.

1.3.2 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Tujuan dilakukannya Kerja Praktik diantaranya:

1. Untuk memenuhi syarat mata kuliah Praktek Kerja Lapangan.
2. Menambah wawasan dan pengalaman kerja sebagai bekal kerja di dunia bisnis sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
3. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara IIB Darmajaya dengan berbagai instansi.
4. Dapat mempraktekan teori-teori yang telah diajarkan secara langsung.
5. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai praktek dalam dunia kerja sehingga dapat memberikan bekal kepada mahasiswa untuk terjun langsung kelapangan.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Program

Dalam pelaksanaan program kerja praktek, penulis ditempatkan pada Koperasi Bina Mandiri Sejahtera (KBMS) yang beralamat di Jl. Pattimura No.27 Kupang Kota Teluk Betung Utara Bandar Lampung. Selama 28 hari dari tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan 20 September 2019. Penulis diposisikan pada bagian *account oficer* selama melaksanakan praktik kerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan kerja praktek adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menerangkan tentang latar belakang kerja praktek secara umum, ruang lingkup kerja program *apprentic*e/kerja praktek, manfaat dan tujuan kerja praktek, tempat dan waktu pelaksanaan program kerja, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah perusahaan yang menceritakan terbentuknya perusahaan hingga berkembang sampai saat ini, visi dan misi perusahaan, bidang usaha/kegiatan utama dari Koperasi Bina Mandiri Sejahtera, lokasi perusahaan dan struktur organisasi.

BAB III : PERMASALAHAN PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis menganalisa permasalahan apa yang terjadi dalam perusahaan, setelah menganalisa tentunya penulis menemukan beberapa temuan masalah yang selanjutnya membuat perumusan dari masalah tersebut sehingga membentuk kerangka pemecahan masalah yang ada. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang landasan teori sebagai acuan dari rancangan program yang akan dibuat oleh mahasiswa.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi hasil uraian hasil analisis yang diperoleh berkaitan dengan landasan teori yang relevan dan pembahasan hasil analisis mengenai perluasan area penyaluran kredit Koperasi Bina Mandiri Sejahtera (KBMS).

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis berusaha untuk menarik beberapa simpulan yang penting dari semua uraian dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN